

# **REVISI RENCANA KERJA SATKER PUSAT PENYULUHAN**

# **TAHUN 2017**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

## KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019 dan mengacu pada Renja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2017 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dituangkan dalam sub kegiatan yang tertuang dalam output kegiatan dan akan diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2017 Satker Pusat Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2016 Tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Output yang tertuang dalam Lembaran Kerja (LK) Satker merupakan target yang harus diselesaikan dalam satu tahun dan prosentase capaian output kegiatan tersebut akan diukur dan dituangkan pada Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Semoga Renja ini berguna dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2017 dan semoga buku ini bermanfaat.

Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2017  
Kepala Pusat,  
  
Dra. Siti Aini Hanum, MA  
NIP.19580207 198403 2 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Revisi Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Pusat Penyuluhan untuk periode Tahun 2017 sesuai dengan kebijakan APBN-P. Pusat Penyuluhan terdiri dari empat IKK yaitu :

1. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 450 unit KTH dengan pagu APBN-P Rp. 4.933.022.000,-.
2. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk sebanyak 10 unit dengan pagu APBN-P Rp. 462.090.000,-.
3. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadya (LP2UKS) sebanyak 10 unit dengan pagu APBN-P Rp. 427.458.000,-.
4. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 300 orang dengan pagu APBN-P Rp.1.326.650.000,-.

Jakarta, Agustus 2017

Kepala Pusat,



Dra. Siti Aini Hanum, MA  
NIP.19580207 198403 2 001

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar.....   | i       |
| Ringkasan Eksekutif.....                                      | ii      |
| Daftar Isi .....  | iii     |
| Batasan Istilah.....  | iv      |
| Daftar Gambar.....  | v       |
| Daftar Tabel.....   | vi      |
| <br>  |         |
| I. PENDAHULUAN.....   | 1       |
| A. Latar Belakang.....  | 1       |
| B. Tugas Pokok, Fungsi, Visi Misi Unit Kerja.....             | 3       |
| C. Program dan Kegiatan.....                                  | 12      |
| II. CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA 2016.....                       | 13      |
| A. Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2016.....                  | 13      |
| B. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan..... | 20      |
| III. RENCANA KERJA TAHUN 2017.....                            | 21      |
| A. Rencana Kerja Tahun 2017.....                              | 21      |
| B. Pengukuran Kinerja.....                                    | 26      |
| IV. PENUTUP.....  | 29      |

## BATASAN ISTILAH

1. Penyuluhan Kehutanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan, baik penyuluhan PNS, swasta maupun swadaya.
2. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
3. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluhan kehutanan.
4. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum dan kelestarian lingkungan.
5. Sarana penyuluhan adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan penyuluhan.
6. Prasarana penyuluhan adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan penyuluhan.
7. Hutan Desa (HD) adalah sebuah mekanisme pengelolaan yang diberikan kepada lembaga desa.
8. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya diawali dengan mekanisme penanaman, hingga mencapai umur tertentu untuk dilakukan penebangan dan pemanfaatan dilakukan oleh kelompok masyarakat.
9. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah sebuah mekanisme pengelolaan hutan yang diberikan kepada kelompok masyarakat.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit pengelolaan hutan terkecil, di tingkat tapak. Untuk kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh hutan produksi, disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), hutan lindung (KPHL) dan hutan konservasi (KPHK).
11. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

|   |   |
|---|---|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan (Permenlhk No. P.18/MENLHK-II/2015)..... | 7 |
|---|---|

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Indikator Kinerja Program Peningkatan Penyuluhan ..... | 12      |
| Tabel 2. Matrik Capaian Rencana Kerja Tahun 2016.....           | 13      |
| Tabel 3. Matrik Renja Tahun 2017.....                           | 21      |

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Seiring dengan pergantian pemerintahan Kabinet Kerja, terjadi penggabungan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seiring dengan penggabungan tersebut, terdapat perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan yang pada awalnya Pusat Penyuluhan Kehutanan merupakan eselon II dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan sebagai pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden.

Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Oleh karena itu difokuskan pada upaya mewujudkan pembangunan unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang akan dikelola secara profesional. KPH Lindung fokus pada pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, KPH Produksi fokus pada peningkatan produksi kayu dan HHBK, serta KPH Konservasi fokus pada pengelolaan hutan konservasi dan biodiversity. Pengembangan

kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD), maupun kemitraan usaha kehutanan, harus menjadi alternatif utama pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Keberadaan penyuluhan kehutanan sangat berperan penting melakukan dalam kegiatan pendampingan masyarakat sekitar hutan di wilayah binaan, mulai dari fase prakondisi input, output, outcome dan dampak kegiatan usaha produktif kehutanan dalam wadah kelompok tani hutan.

Pendampingan yang dilakukan para penyuluhan harus mengarah pada peningkatan kapasitas KTH dari tingkatan pemula, madya sampai dengan tingkatan utama yang merepresentasikan keswadayaan dan keberlanjutan produksi yang dikembangkan unit usaha KTH.

Untuk menjawab permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya manusia khususnya penyuluhan dan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia yang terkait dengan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, memperjelas ukuran-ukuran kinerja yang ingin dicapai pada periode lima tahun kedepan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan.

## B. Tugas Pokok, Fungsi, Visi Misi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Penyuluhan (Pusluh) sebagai Eselon II yang berkedudukan dibawah Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Presiden adalah : ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong-Royong”.***

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
- (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pusat Penyuluhan (Pusluh) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

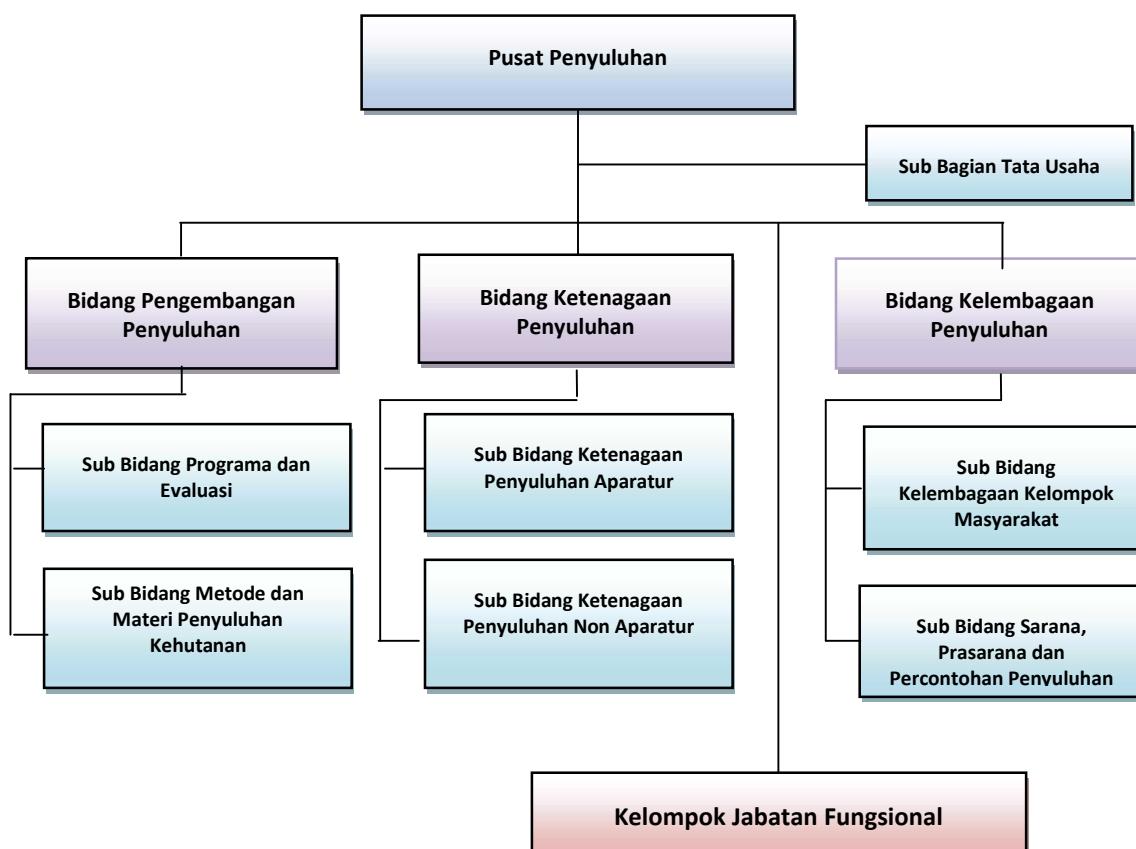
Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan

5. pelaksanaan administrasi Pusat.

Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 terdiri dari Tiga Eselon III dan Tujuh Eselon Empat, yaitu :

1. Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan.
2. Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
3. Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
4. Sub Bagian Tata Usaha.
5. Sub Bidang Programa dan Evaluasi.
6. Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan.
7. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur.
8. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur.
9. Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat.
10. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan (PermenLHK No. 18/Menlhk-II/2015)

**1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan :**

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

**2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :**

Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

**3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan:**

Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan; dan

- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Eselon Empat lingkup Pusat Penyuluhan
- Masing-masing Sub Bidang sebagaimana sudah disebut diatas melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a) Subbidang Programa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan program penyuluhan.
  - b) Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan metode dan materi penyuluhan.
  - c) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah.
  - d) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.
  - e) Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.
  - f) Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.

- g) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- 5 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional Penyuluhan Kehutanan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Program dan Kegiatan

Sesuai kebijakan pembangunan kehutanan dengan pengarusutamaan pembangunan KPH, langkah operasional kebijakan pembangunan tersebut dituangkan kedalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan tugas dan fungsi Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Sesuai tugas dan fungsinya Pusat Penyuluhan mendukung Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan kegiatan utama, yaitu : Peningkatan Penyuluhan sesuai RPJMN tahun 2015-2019 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Penyuluhan

| Kegiatan               | Indikator Kinerja Kegiatan  |
|------------------------|---|
| Peningkatan Penyuluhan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya 5.000 unit KTH.</li> <li>b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk sebanyak 500 unit.</li> <li>c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadya (LP2UKS) sebanyak 250 unit.</li> <li>d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5.000 orang.</li> </ul> |

### BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2017

#### A. Rencana Kerja Tahun 2017

Rencana Kerja Kegiatan Penyuluhan tahun 2017 sebagaimana tabel 4 :

#### **KEGIATAN SATKER PUSLUH TAHUN 2017**

#### **NAMA PROGRAM : Penyuluhan dan Pengembangan**

#### **SDM**

| Indikator Kegiatan   | Unit Kegiatan  | Unit Indikator   | Elemen Indikator   | Elemen Indikator   | JUMLAH        | TARGET TAHUN 2017 |
|--|--|--|--|--|---------------|-------------------|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)           | (7)               |
| Peningkatan Penyuluhan   |  |  |  |  | 8.350.000.000 |                   |
| Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 450 unit. | Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH                              | Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kelas KTH                        | Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH                              | Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH                              | 2.830.257.000 |                   |
|  | Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH                     | Tersediannya Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH        | Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH                     | Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH                     | 204.190.000   | 1 Laporan         |
|  | Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH                                       | 1.930.340.000 | 80 Unit           |
|  | Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur | Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur | Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur | Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur | 154.725.000   | 1 Laporan         |
|  | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)                 | Terfasilitasinya Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)           | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)                 | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)                 | 110.500.000   | 1 Laporan         |

|  |   |  |  |               |           |
|--|---|--|--|---------------|-----------|
| Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)     | Terfasilitasinya Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) | Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)     | Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)     | 37.450.000    | 1 Laporan |
| Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)   | Terfasilitasinya Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)          | Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)   | Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)   | 149.550.000   | 4 Unit    |
| Fasilitasi Pembentukan Unit Percontohan                  | Terfasilitasinya Pembentukan Unit Percontohan                         | Fasilitasi Pembentukan Unit Percontohan                  | Fasilitasi Pembentukan Unit Percontohan                  | 243.502.000   | 6 Unit    |
| Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan       | Berkembangnya Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan                   | Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan       | Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan       | 1.345.429.000 |           |
| Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017                  | Terlaksananya Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017                 | Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017                  | Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017                  | 476.489.000   | 1 Laporan |
| Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017        | Terlaksananya Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017       | Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017        | Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017        | 284.156.000   | 1 Laporan |
| Penggandaan Materi Penyuluhan                            | Terlaksananya Penggandaan Materi Penyuluhan                           | Penggandaan Materi Penyuluhan                            |  | 234.574.000   | 1 Laporan |
| Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari                 | Terbitnya Penerbitan Majalah Kenari                                   | Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari                 | Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari                 | 47.670.000    | 1 Edisi   |
| Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik | Terpublikasinya Materi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik | Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik | Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik | 212.540.000   | 1 Paket   |
| Pengadaan Baju Penyuluhan LHK                            | Tersedianya Baju penyuluhan LHK                                       | Pengadaan Baju Penyuluhan LHK                            | Pengadaan Baju Penyuluhan LHK                            | 90.000.000    | 180 Stel  |
| Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan  | Tersusunnya Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan   | Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan  | Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan  | 758.116.000   |           |

|  |   |   |   |   |             |            |
|--|---|---|---|---|-------------|------------|
|  | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018          | Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018         | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018          | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018          | 77.325.000  | 1 Dokumen  |
|  | Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2018                         | 66.951.000  | 1 Dokumen  |
|  | Penyusunan Programa Penyuluhan 2018   | Tersusunnya Programa Penyuluhan Tahun 2018                                    | Penyusunan Programa Penyuluhan 2018   | Penyusunan Programa Penyuluhan 2018   | 20.365.000  | 1 Dokumen  |
|  | Updating data penyuluhan  | Updating data penyuluhan  | Updating data penyuluhan  | Updating data penyuluhan  | 22.450.000  | 1 Laporan  |
|  | Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)              | Tersusunnya Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)             | Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)              | Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)              | 41.460.000  | 19 Laporan |
|  | Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016                                       | Tersusunnya LKj Satker PUSLUH Tahun 2016                                      | Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016                                       | Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016                                       | 24.700.000  | 1 Laporan  |
|  | Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi                   | 170.855.000 | 1 Laporan  |
|  | Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan   | Tersusunnya Laporan Monev Penyuluhan  | Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan   | Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan   | 300.600.000 | 1 Laporan  |
| Terbentuknya koperasi Kelompok Tani Hutan sejumlah 10 unit.                                      | Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi                                | Terfasilitasinya Pengembangan Koperasi  | Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi                                | Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi                                | 462.090.000 | 10 Unit    |
| Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 10 unit. | Verifikasi (LP2UKS)   | Terinventarisasinya LP2UKS yang layak difasilitasi.                           | Verifikasi (LP2UKS)   | Terinventarisasinya LP2UKS yang layak difasilitasi.                           | 164.320.000 | 1 Laporan  |
|  | Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) | Terbentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) | Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) | Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) | 263.138.000 | 10 Unit    |

|  |   |  |   |  |               |    |         |
|--|---|--|---|--|---------------|----|---------|
| Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 300 orang. | Pembentukan tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 300 orang. | Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 300 orang. | Pembentukan tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 300 orang. | Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 300 orang. | 1.326.650.000 |    |         |
|  | Pembinaan Teknis Penyuluhan                                       | Terlaksananya Pembinaan Teknis Penyuluhan                          | Pembinaan Teknis Penyuluhan                                       | Pembinaan Teknis Penyuluhan  | 1.326.650.000 |    |         |
|  | Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluhan                              | Terselenggaranya Pembinaan Penyuluhan                              | Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluhan                              | Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluhan                               | 1.277.400.000 | 1  | Laporan |
|  | Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluhan Kehutanan Lingkup Pusluh  | Meningkatnya Kapasitas Teknis Penyuluhan Kehutanan Lingkup Pusluh  | Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluhan Kehutanan Lingkup Pusluh  | Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluhan Kehutanan Lingkup Pusluh   | 49.250.000    | 1  | Laporan |
| Layanan Perkantoran  | Layanan Perkantoran   | Lancarnya kegiatan perkantoran                                     | Layanan Perkantoran   | Lancarnya kegiatan perkantoran                                     | 1.200.000.000 | 12 | Layanan |

## B. Pengukuran Kinerja

| KODE     | URAIAN   | VOLUME    | JUMLAH (Rp.)  |
|----------|--|-----------|---------------|
| 5444     | Peningkatan Penyuluhan   |           | 8.350.000.000 |
| 5444.001 | Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 450 unit.             |           | 2.830.257.000 |
| 051      | Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH  |           | 2.830.257.000 |
| A        | Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH   | 1 Lap     | 204.190.000   |
| B        | Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH   | 80 unit   | 1.930.340.000 |
| C        | Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur                           | 1 Lap     | 154.725.000   |
| D        | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)   | 1 Lap     | 110.500.000   |
| E        | Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)   | 1 Lap     | 37.450.000    |
| F        | Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM (Posluhutdes)   | 4 Unit    | 149.550.000   |
| G        | Fasilitasi Pembentukan Unit Percontohan  | 6 Unit    | 243.502.000   |
| 052      | Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan   |           | 1.345.429.000 |
| A        | Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2017  | 1 Lap     | 476.489.000   |
| B        | Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2017  | 1 Lap     | 284.156.000   |
| C        | Pengadaan Materi Penyuluhan  | 1 Lap     | 234.574.000   |
| D        | Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari   | 1 Edisi   | 47.670.000    |
| E        | Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik   | 1 Paket   | 212.540.000   |
| F        | Pengadaan Baju Penyuluhan LHK  | 180 Stel  | 90.000.000    |
| 053      | Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan  |           | 758.116.000   |
| A        | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018                             | 1 Dok     | 77.325.000    |
| B        | Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2018  | 1 Dok     | 66.951.000    |
| C        | Penyusunan Programa Penyuluhan Tahun 2018  | 1 Dok     | 20.365.000    |
| D        | Updating data penyuluhan   | 1 Lap     | 22.450.000    |
| E        | Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)                                 | 19 Lap    | 41.460.000    |
| F        | Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2016  | 1 Lap     | 41.460.000    |
| G        | Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi                                      | 1 Lap     | 170.855.000   |
| H        | Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan  | 1 Lap     | 300.600.000   |
| 5444.002 | Terbentuknya koperasi Kelompok Tani Hutan sejumlah 10 unit.                                      |           | 462.090.000   |
| 051      | Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi KTH   |           | 462.090.000   |
| A        | Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi   | 10 Unit   | 462.090.000   |
| 5444.003 | Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 10 unit. |           | 427.458.000   |
| 051      | Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)                    |           | 427.458.000   |
| A        | Verifikasi pembentukan LP2UKS  | 1 Lap     | 164.320.000   |
| B        | Fasilitasi pembentukan LP2UKS  | 10 Unit   | 263.138.000   |
| 5444.004 | Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 300 orang.                               |           | 1.326.650.000 |
| 051      | Pembinaan Teknis Penyuluhan  | 300 orang | 1.326.650.000 |
| A        | Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluhan   |           | 1.277.400.000 |
| B        | Peningkatan Kapasitas Teknis Penyuluhan Kehutanan Lingkup Pusluh                                 |           | 49.250.000    |

|          |   |  |               |
|----------|---|--|---------------|
| 5444.994 | Layanan Perkantoran selama 12 Bulan.    |  | 1.200.000.000 |
| 002      | Operasional dan Pemeliharaan Kantor     |  | 1.200.000.000 |
| A        | Pemeliharaan Peralatan Perkantoran      |  | 31.500.000    |
| B        | Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat |  | 313.076.000   |
| C        | Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua   |  | 45.500.000    |
| D        | Operasional Perkantoran                 |  | 809.924.000   |

## BAB II. CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

### A. Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Capaian kinerja kegiatan Peningkatan Penyuluhan tahun 2016 sebagaimana tabel 2 dan 3 berikut :

Tabel 2. Matrik Capaian Rencana Kerja Tahun 2016

| No  | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Unit Kegiatan  | Unit Indikator   | Elemen Kegiatan   | Elemen Indikator  | Capaian s.d. Tahun 2016 |              |
|-----|--|---|--|--|---|---|-------------------------|--------------|
|     |  |   |  |  |   |   | Target                  | Realisasi    |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)                     | (9)          |
| 1   | <b>Penyuluhan dan pengembangan SDM /Peningkatan Penyuluhan</b> | <b>Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 450 unit.</b> | Perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH                   | Tersedianya data dan informasi kelas KTH yang akan naik kelas.                           | Perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH.     | Tersedianya data dan informasi jumlah KTH yang akan naik kelas. | 450 unit KTH            | 450 Unit KTH |
|     |  |   | Pembinaan teknis kenaikan kelas KTH.                                 | Tersedianya tenaga pendamping kenaikan kelas KTH yang kompeten.                          | Pembinaan teknis kenaikan kelas KTH.                    | Terlaksananya kegiatan bimtek kenaikan kelas KTH.               | 50 orang                | 50 orang     |
|     |  |   | Pembinaan teknis penyuluhan swadaya masyarakat (PKSM) di KPH dan HR. | Tersedianya tenaga PKSM pendamping KPH dan HR yang kompeten.                             | Pembinaan teknis PKSM pendamping KPH dan HR.            | Terlaksananya kegiatan bimtek PKSM.                             | 50 orang                | 50 orang     |
|     |  |   | Pembinaan teknis penyuluhan swasta (PKS) .                           | Tersedianya tenaga PKS pendamping masyarakat yang kompeten.                              | Pembinaan teknis PKS pendamping masyarakat.             | Terlaksananya kegiatan bimtek PKS.                              | 50 orang                | 50 orang     |
|     |  |   | Fasilitasi percontohan pemberdayaan PKSM di KPH .                    | Terfasilitasinya percontohan pemberdayaan pos penyuluhan desa hutan oleh KTH binaan PKSM | Fasilitasi percontohan pemberdayaan PKSM di KPH .       | Terfasilitasinya percontohan pemberdayaan PKSM di KPH .         | 10 unit                 | 10 unit      |
|     |  |   | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (PKPN)               | Terfasilitasinya Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (PKPN).                            | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (PKPN). | Terfasilitasinya Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (PKPN).   | 1 Tim                   | 1 Tim        |
|     |  |   | Fasilitasi Sekretariat Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS).         | Terfasilitasinya aktivitas Sekretariat BAKORNAS.   | Fasilitasi Sekretariat BAKORNAS.                        | Terfasilitasinya aktivitas kesekretariatan BAKORNAS.            | 1 keg                   | 1 keg        |
|     |  |   | Penilaian Lomba Wana Lestari.  | Tersedianya kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM)                                    | Penilaian Lomba Wana Lestari.                           | Terlaksananya penilaian Lomba Wana Lestari.                     | 34 prov                 | 31 prov      |

| No  | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Unit Kegiatan  | Unit Indikator  | Elemen Kegiatan   | Elemen Indikator   | Capaian s.d. Tahun 2016 |           |
|-----|------------------|----------------------------|--|---|---|--|-------------------------|-----------|
|     |                  |                            |  |   |   |  | Target                  | Realisasi |
| (1) | (2)              | (3)                        | (4)  | (5)   | (6)   | (7)  | (8)                     | (9)       |
|     |                  |                            | Kampanye Indonesia Menanam (KIM)   | Tersedianya kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM).                                  | Kampanye Indonesia Menanam (KIM)  | Terselenggaranya Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM)                                     | 1 paket.                | 1 paket   |
|     |                  |                            | Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2016.                                     | Tersedianya Laporan Lomba Wana Lestari , Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari.        | Penyelenggaraan Lomba Wana Lestari , Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2016. | Tersedianya Hasil Penyelenggaraan Lomba Wana Lestari , Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari. | 150 orang               | 129 orang |
|     |                  |                            | Penggandaan Materi Penyuluhan Kehutanan  | Tersedianya Materi Penyuluhan Kehutanan 10 judul.                                       | Penyusunan Materi Penyuluhan Kehutanan  | Tersedianya Materi Penyuluhan Kehutanan sejumlah 10 judul.                                     | 10 judul.               | 10 judul. |
|     |                  |                            | Penyusunan dan penerbitan Majalah Kenari   | Tersedianya Majalah Kenari sejumlah 1 judul.  | Penyusunan dan penerbitan Majalah Kenari.   | Tersusunnya Majalah Kenari dan Terbitnya Majalah Kenari 1judul.                                | 1 judul.                | 1 judul.  |
|     |                  |                            | Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik.                              | Terfasilitasinya Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik.              | Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik.                               | Tersusunnya materi publikasi penyuluhan di media cetak dan media elektronik.                   | 2 paket.                | 2 paket.  |
|     |                  |                            | Workshop pengembangan materi penyuluhan.   | Terfasilitasinya pengembangan materi penyuluhan.  | Workshop pengembangan materi penyuluhan.  | Terlaksananya Workshop pengembangan materi penyuluhan.   | 1 keg.                  | 1 keg.    |
|     |                  |                            | Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusluh Tahun 2017.                            | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusluh Tahun 2017.                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran                                 | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusluh Tahun 2017.                                   | 1 dok                   | 1 dok     |
|     |                  |                            | Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Lembaga (RKA-KL) Pusluh Tahun 2017. | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Lembaga (RKA-KL) Pusluh Tahun 2017. | Penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Lembaga (RKA-KL) Pusluh Tahun 2017.  | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Lembaga (RKA-KL) Pusluh Tahun 2017.        | 1 dok                   | 1 dok     |
|     |                  |                            | Penyusunan Monev Laporan Pusluh Tahun 2016.  | Tersusunnya Monev Laporan Pusluh Tahun 2016.  | Penyusunan Monev Laporan Pusluh Tahun 2016.   | Tersusunnya Monev Laporan Pusluh Tahun 2016.   | 1 dok                   | 1 dok     |
|     |                  |                            | Penyusunan Programa Penyuluhan Tahun 2017.   | Tersusunnya Programa Penyuluhan Tahun 2017.   | Penyusunan Programa Penyuluhan Tahun 2017.  | Tersusunnya Programa Penyuluhan Tahun 2017.  | 1 dok                   | 1 dok     |
|     |                  |                            | Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi.                           | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi.           | Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi.                            | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi.                  | 1 paket                 | 1 paket   |
|     |                  |                            | Penyelenggaraan Penatausahaan BMN.   | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penatausahaan BMN.                                     | Penyelenggaraan Penatausahaan BMN.  | Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penatausahaan BMN.  | 1 lap.                  | 1 lap.    |
|     |                  |                            | Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan,  | Tursusunnya Penyusunan Laporan Satker (Bulanan,   | Penyusunan Laporan Satker (Bulanan,   | Tursusunnya Penyusunan Laporan Satker (Bulanan,  | 19 lap.                 | 19 lap.   |

| No  | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan   | Unit Kegiatan   | Unit Indikator   | Elemen Kegiatan   | Elemen Indikator   | Capaian s.d. Tahun 2016 |              |
|-----|------------------|--|---|--|---|--|-------------------------|--------------|
|     |                  |  |   |  |   |  | Target                  | Realisasi    |
| (1) | (2)              | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)  | (8)                     | (9)          |
|     |                  |  | Semester, Tahunan).   | Triwulan, Semester, Tahunan).  | Semester, Tahunan).   | Triwulan, Semester, Tahunan).  |                         |              |
|     |                  |  | Penyusunan Laporan LKj Pusluh Tahun 2016                            | Tursusunnya Laporan LKj Pusluh Tahun 2016  | Penyusunan Laporan LKj Pusluh Tahun 2016                            | Tursusunnya Laporan LKj Pusluh Tahun 2016  | 1 lap.                  | 1 lap.       |
|     |                  |  | Penyusunan Design SPIP.   | Tursusunnya Design SPIP.   | Penyusunan Design SPIP.   | Tursusunnya Design SPIP.   | 1 lap.                  | 1 lap.       |
|     |                  |  | Temu Teknis Penyelenggara Penyuluhan .                              | Terselenggaranya Temu Teknis Penyelenggara Penyuluhan .                          | Temu Teknis Penyelenggara Penyuluhan .                              | Terselenggaranya Temu Teknis Penyelenggara Penyuluhan .                          | 70 orang                | 70 orang     |
| 2   |                  | Terbentuknya Koperasi Kelompok Tani Hutan sejumlah 22 unit.                            | Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi.                     | Tersafilitasi penguatan dan pengembangan koperasi.                               | Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi.                     | Tersafilitasi penguatan dan pengembangan koperasi.                               | 22 unit                 | 22 unit.     |
|     |                  |  | Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Pendamping Koperasi. | Terselenggaranya Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Pendamping Koperasi.             | Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Pendamping Koperasi. | Terselenggaranya Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Pendamping Koperasi.             | 50 orang                | 50 orang     |
| 3   |                  | Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pegangan Usaha Kehutanan (LP2UKS) sejumlah 15 unit. | Verifikasi pembentukan LP2UKS.                                      | Tersusunnya data verifikasi LP2UKS yang layak difasilitasi.                      | Verifikasi pembentukan LP2UKS.                                      | Tersusunnya data verifikasi LP2UKS yang layak difasilitasi.                      | 1 Lap                   | 1 Lap        |
|     |                  |  | Pemagangan di LP2UKS.   | Terlaksananya pemagangan LP2UKS sejumlah 10 unit.                                | Pemagangan di LP2UKS.   | Terlaksananya pemagangan LP2UKS sejumlah 10 unit.                                | 10 unit.                | 10 unit.     |
|     |                  |  | Fasilitasi pembentukan LP2UKS.                                      | Tersafilitasinya LP2UKS yang layak difasilitasi.                                 | Fasilitasi pembentukan LP2UKS.                                      | Tersafilitasinya LP2UKS yang layak difasilitasi.                                 | 15 proposal             | 15 proposal. |
| 4   |                  | Terbentuknya tenaga pendamping handal bagi KTH sejumlah 450 orang.                     | Penyelenggaraan pembinaan penyuluh kehutanan sejumlah 15 paket.     | Terselenggaranya Penyelenggaraan pembinaan penyuluh kehutanan sejumlah 15 paket. | Penyelenggaraan pembinaan penyuluh kehutanan sejumlah 15 paket.     | Terselenggaranya Penyelenggaraan pembinaan penyuluh kehutanan sejumlah 15 paket. | 15 paket                | 15 paket.    |

## B. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penyuluhan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sehingga kelembagaan pengelola penyuluhan di propinsi belum ditetapkan oleh daerah sehingga terjadi kevakuman para pengelola kegiatan di daerah.
2. Seringnya pergantian pejabat dan pengelola kegiatan penyuluhan kehutanan di provinsi sehingga menghambat pembangunan penyuluhan kehutanan di daerah.
3. Jumlah penyuluhan kehutanan semakin berkurang, baik dikarenakan beralih jabatan ke pejabat struktural/non struktural, pensiun, meninggal maupun permintaan sendiri untuk pensiun.
4. Kualitas SDM penyuluhan kehutanan dan pengelola penyuluhan masih kurang sehingga berdampak kepada aktivitas kegiatan pembangunan kehutanan.
5. Identifikasi potensi kelompok tani hutan (KTH) belum optimal.
6. Belum optimalnya dukungan sarana prasarana, metode dan materi penyuluhan kehutanan.
7. Kemitraan dalam rangka penyediaan dana kegiatan penyuluhan kehutanan masih sebatas wacana dan belum merupakan aktivitas nyata.
8. Daya dukung Eselon I teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan di lapangan masih belum berjalan secara optimal.
9. Kurangnya intensitas komunikasi dan koordinasi antara pengelola penyuluhan pusat dan daerah sehingga masih terjadi salah pengertian dalam melaksanakan kegiatan.

## BAB IV.PENUTUP

Dengan telah disusunnya Revisi Rencana Kerja Pusluh Tahun 2017 ini semoga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, diucapkan terima kasih dan semoga buku ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan.

---

# LAMPIRAN

## Kegiatan-Kegiatan Pusat Penyuluhan 2015



Kegiatan LP2UKS  
Wanawiyata Widyakarya





POSLUHUTDES KTH Gempa 01

Kab. Bangka Tengah



POSLUHUTDES Kab. Pringsewu



Rangkaian Acara Temukarya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2015





Rangkaian Acara Pembinaan Penyuluhan Kehutanan PNS 2015 di beberapa Provinsi



Rapat Kerja IPKINDO Tahun 2015  
dengan Pusat Penyuluhan



Munas PKSM Tahun 2015  
di Karang Anyar